

Surat Kabar : Media Indonesia  
Subyek : Reklamasi Pantura

Edisi : 23-Agus-2011  
Halaman : 24

### **Segudang Masalah dari Reklamasi Pantura**

**Jika proyek reklamasi diteruskan, persoalan banjir, gangguan pelayaran, dan pemadaman listrik siap mengancam.**

Persoalan reklamasi pantai utara (pantura) yang setidaknya sudah berjalan satu dekade ini belum juga usai. Sayangnya, ibarat film, jika episode dilanjutkan tampaknya akan berakhir nestapa. Setidaknya inilah yang terlihat dari acara pemaparan analisis dampak lingkungan dan infrastruktur pembangkit listrik yang berlangsung minggu lalu di Jakarta. Pemaparan yang diberikan instansi pemerintah, yakni Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga lembaga riset independen, menunjukkan segudang masalah yang akan muncul dari reklamasi tersebut.

"Reklamasi ini akan meningkatkan risiko banjir, terutama di daerah pinggiran," kota Tim Foster dari DHI Water Environment Pte Ltd. Analisis yang dilakukan lembaga riset independen yang berbasis di Denmark itu menunjukkan, di sektor timur akan terjadi kenaikan tingkat rata-rata debit air lebih dari 10 cm. Angka tersebut setara dengan kenaikan rata-rata air selama 40 tahun. "Risiko banjir akan bertambah, jika dalam keadaan rob dan debit air tinggi, seperti keadaan banjir 2002 dan 2007." tukasnya.

Bukan hanya banjir, DHI menilai reklamasi pantura juga dapat memengaruhi hasil perikanan. Hal ini bisa disebabkan limpasan sedimen yang terbentuk dari proyek tersebut. Konsentrasi sedimen akan memacu tingkat kekeruhan tinggi yang selanjutnya bisa membunuh komunitas bentik yang penting dalam rantai makanan di laut. Air yang keruh ini juga bisa mengganggu aktivitas maritim. Kemungkinan buruk itu tampaknya juga telah diketahui nelayan sehingga penentangan dari kelompok masyarakat tersebut sudah muncul. "Dampak limpasan sedimen terhadap kegiatan perikanan sangat perlu ditambahkan dalam kajian amdal," tambah Foster.

Pantura merupakan kawasan andalan DKI Jakarta dalam rangka membangun Jakarta sebagai service city. Proyek reklamasi pantura Jakarta membentang 32 km dengan kawasan reklamasi sebesar 2.700 ha. Kawasan tersebut diarahkan untuk menjadi kawasan kota baru yang mandiri.

#### **Pemadaman listrik**

Bukan hanya warga pesisir yang akan dirugikan dari berlanjutnya reklamasi, masyarakat luas pun akan merasakan kerugian tersebut. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memperkirakan 2,2 juta konsumen di DKI terancam dikenai pemadaman listrik akibat terganggunya pasokan bahan bakar (keru so kon pada pipa pemasok bahan bakar) ke PLTU Muara Karang, Jakarta Utara, dan PTCU Muara Tawar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Laju sedimentasi yang semakin meningkat bisa menyebabkan tersumbatnya air pendingin sehingga harus dilakukan pengerukan secara berkala, kenaikan temperatur air laut untuk pendingin (kompresor) juga dikatakan menjadi lebih besar daripada kondisi saat ini karena sirkulasi yang terganggu sehingga efisiensi pembangkit menurun. Penurunan kualitas pendukung pembangkit ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat keamanan sarana vital. Segala risiko buruk tersebut masih ditambah lagi dengan adanya gas buang dari cerobong setinggi 45 m sampai 107 m ke lingkungan sekitar. Kawasan permukiman mungkin akan terkena *disperse* emisi gas buang.

### **Amdal nasional**

Dengan berbagai risiko lingkungan dan sosial ini, Deputi I MenLH Bidang Tata Lingkungan Imam Hendargo Abu Ismoyo pun meminta pembentukan sistem perizinan amdal terpadu secara nasional, terutama dalam kaitannya dengan reklamasi pantura yang meliputi wilayah DKI Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Pasalnya, hingga kini sering terjadi tumpang tindih perizinan antara pusat dan daerah, meskipun reklamasi itu termasuk pembangunan yang sesuai Perpres No 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang kawasan Jabodetabekpunjur. "Daerah memang punya, wilayah proyeknya. Tapi dampaknya nasional." "Bukan lihat siapa benar siapa salah. Perpres boleh, tapi ada aspek lingkungan, tata penyediaan air, PLTG, harus diperhatikan lingkungan dan tata ruang. Perhatikan kondisi aktual yang ada," tuturnya.

Karena itu, ia pun mengusulkan pembentukan suatu badan independen yang mengurus reklamasi pantura di tiga wilayah tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Badan Pelaksana (BP) Pantura Jakarta yang sebelumnya menangani proyek ini dinilai tidak menjadikan aspek lingkungan hidup dan masyarakat sebagai indikator penting pembangunan. Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan pihaknya menerima masukan dari KLH dan akan segera menindaklanjuti. "Kami segera minta keterangan para pengembang di Teluk Jakarta terkait amdal yang mereka miliki," katanya.

Pihak Bappeda merekomendasikan beberapa hal mengenai pengendalian banjir dari laut akibat penurunan muka tanah. Di antaranya, membatasi pengambilan air tanah, menyediakan kebutuhan air baku dengan air permukaan, menyiapkan daerah retensi air, dan menyiapkan tanggul pelindung laut. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menegaskan reklamasi pantura telah memiliki amdal melalui BP Pantura sehingga rencana itu tetap dilanjutkan. Namun, pada 2003, KLH menegaskan rencana reklamasi pantai utara Jakarta tidak sah. Saat itu muncul surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 14/2003 yang menyebut reklamasi pantai tidak layak dan berpotensi merugikan lingkungan.

Keputusan itu ditentang enam perusahaan dan dimenangi KLH di tingkat kasasi. Keenam perusahaan itu ialah PT Bakti Bangun Era Mulia, PT Taman Harapan Indah, PI Mandala Krida Yudha, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Jakarta Propertindo. Dalam putusan perkara peninjauan kembali yang bertanggal 24 Maret 2011, MA memutuskan reklamasi pantura itu legal.